

TRANSFORMASI SOSIAL: PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI DESA CILEUNYI KULON DALAM PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN RAKSA DESA

Endang Hermawan^{1)*}
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: endanghermawan918@gmail.com^{*}

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Agustus 2023
Disetujui: 16 September 2023
Diterbitkan: 1 Oktober 2023

Abstract

The Sabilulungan Raksa Desa Program, a community empowerment initiative created by the local government of Bandung Regency, is a prime example of the collaborative effort between the government and local communities in advancing infrastructure development. The program's implementation in Cileunyi Kulon Village serves as a case study in assessing the government's role in facilitating community development and empowerment through locally-driven initiatives. Employing a qualitative research approach with a literature review as the primary data collection method, the study confirms the effectiveness of the local government's efforts in the successful implementation of the Sabilulungan Raksa Desa Program. As such, the government's role in community empowerment has been proven to be an essential component in promoting sustainable development within the region.

Keywords: Community Empowerment, Government-Community Collaboration, Sustainable Development

Abstrak

Program Sabilulungan Raksa Desa, sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat yang diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung, merupakan contoh utama dari upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam memajukan pembangunan infrastruktur. Implementasi program ini di Desa Cileunyi Kulon menjadi studi kasus dalam menilai peran pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif lokal. Dengan pendekatan tinjauan literatur sebagai metode utama pengumpulan data, penelitian ini mengkonfirmasi efektivitas upaya pemerintah dalam implementasi Program Sabilulungan Raksa Desa yang sukses. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terbukti menjadi komponen penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

Riggs mengemukakan bahwa ekologi mengacu pada hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya (Engkus, 2017). Dalam perspektif sosiologi, ekologi perubahan sosial melibatkan interaksi dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan proses transformasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun sumber daya manusia dan organisasi dalam masyarakat dengan harapan tercipta hubungan timbal balik yang positif. Ekologi perubahan sosial

mencakup proses saling memengaruhi yang terjadi antara lembaga tinggi negara dan pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masyarakatnya (Gumilar, 2021).

Keterkaitan antara sistem administrasi dan masyarakat menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam ekologi perubahan sosial adalah pemerintah dan masyarakat, dan keduanya harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan diukur dengan kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan tugas-tugas pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal dengan mempertimbangkan perspektif sosiologi dan membangun modal sosial yang kuat. Hal ini meminimalkan kesalahan dan memastikan program-program yang dilaksanakan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat. Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah pedesaan. Menurut Bupati Bandung yang menjabat saat itu juga mengakui bahwa masih terdapat masalah-masalah kompleks yang ada di wilayahnya seperti :

- a. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah yang layak huni.
- b. Ketersediaan air bersih yang kurang.
- c. Kurangnya sistem sanitasi atau saluran pembuangan MCK yang baik.
- d. Kurangnya tempat pembuangan sampah terpadu.
- e. Perubahan kondisi alam yang kian hari kian memburuk .

Disinilah peran pemerintah dan masyarakat dibutuhkan. Upaya-upaya yang dilakukan harus secara optimal dengan mengatasinya melalui peningkatan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki visi dan misi dimana pencapaiannya dilakukan salah satunya dengan menjadikan pembangunan desa sebagai ujung tombaknya (Abdurohim, 2018).

Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa “Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa merupakan suatu kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan sarana fisik di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Salah satu tujuan program ini dibentuk adalah untuk mempercepat capaian peningkatan dari kualitas pembangunan fisik melalui peran serta dari pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pelaksanaan program Raksa Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan dan penanggulangan kawasan-kawasan kumuh di desa-desa di Kabupaten Bandung, seperti ketersediaan fasilitas cuci, kakus, fasilitas mandi, dan rumah yang layak huni. Salah satu desa yang masih membutuhkan bantuan dalam hal ini adalah Desa Cileunyi Kulon di wilayah Kabupaten Bandung. Selain kekurangan fasilitas sanitasi yang memadai, masyarakat di desa ini juga sering mengalami kekurangan air bersih terutama saat musim kemarau. Keterlibatan dan peran aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat sangatlah penting dalam membangun desa Cileunyi Kulon agar menjadi lebih baik dan terarah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di salah satu desa di wilayah tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah pada perspektif sosiologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi sosial yang diharapkan melalui program ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam ilmu sosial, teori pembangunan dibagi menjadi dua paradigma: modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi menyoroti pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial secara makro serta nilai-nilai individu yang mendukung perubahan. Sementara itu, paradigma ketergantungan mencakup teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia sesuai dengan klasifikasi Larrain. Namun, definisi pembangunan tidak pasti dan bervariasi dalam setiap disiplin ilmu. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. (Digdowiswsio, 2019)

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipatif, dan melindungi kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan melibatkan tiga aspek yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling), memperkuat potensi masyarakat (Empowering), dan melindungi kepentingan masyarakat lemah (Protecting). Pemberdayaan tidak hanya meningkatkan potensi individu, tetapi juga pranata sosial yang ada. Penting untuk menanamkan nilai-nilai modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang masih terjebak dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. (Noor, 2011)

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat terbatas. (Creswell, 2016) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatoris dan dokumentasi. Ada pun informan dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel purposive sampling dengan informan yang memiliki kaitan mengenai transformasi sosial yang diharapkan melalui program pemberdayaan masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung. Kemudian data dianalisis melalui proses mempersiapkan data terlebih dahulu, memulai coding semua data, menarasikan data dan sampai pada pembuatan interpretasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses dilaksanakannya Program Sabilulungan yang diawali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 terdapat tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:

1. Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, dan anggota BPD
2. Terdapat beberapa agenda dari musyawarah desa tersebut:
3. Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
4. Menyusun dan memutuskan TPKD;

5. Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
6. Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Selanjutnya menurut Camat Cileunyi Bapak Yayan Suheryan, untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Yang ketiga proses di tingkat Kabupaten. Menurut Ibu Rohmiasih, M.Si, Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Tim Pembina Kabupaten merundingkan pelaksanaan sosialisasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa apabila semua hasil perencanaan dari setiap kecamatan telah didapatkan.

Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
2. Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
3. Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan melalui keputusan Bupati
4. Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.

Dari data-data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan telah berhasil dan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017, dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi	Nilai (Rp)	Bantuan
1	SPAL Kp Galumpit RW 17	100	10.000.000,	
		%		
2	Perbaikan Sehat Nugraha RT 01/06	100	10.000.000,	
		%		
3	Perbaikan Rumah Sehat Ibu Iroh RT 02/04	100	10.000.000,	
		%		
4	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Tatang RT 03/23	100	10.000.000	
		%		
5	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Deni Sundana RT 02/15	100	10.000.000	
		%		
JUMLAH			50.000.000	

Sumber: APBDes Cileunyi Kulon Tahun 2017

Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diejlaskan mengenai Pembiayaan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bersumber dari hasil pengumpulan data menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung diketahui bahwa pengalokasian dana PSPM Raksa Desa ditanggung oleh APBD Kabupaten Bandung. Sebagaimana SK Bupati dana yang didapatkan oleh setiap desa sekitar Rp.50.000.000, sebab dana PSPM Raksa Desa dengan dana Reses dipisahkan sejak tahun 2016 lalu.

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Ibu Rohmiasih, M.Si, Proses pemberian dana dilakukan secara langsung dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yaitu dengan cara mentransfer melalui rekening yang bersangkutan. Dan APBN Kabupaten Bandung lah yang membiayai pelaksanaan program ini. Berdasarkan hasil data, karena dana yang didapatkan dari pemerintah desa diberikan secara langsung maka proses pembiayaan dianggap berhasil dan berlangsung dengan jelas dan sederhana.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon

Di dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung.

1. Faktor Penghambat
 - a. Masih rendahnya pendidikan sebagian aparat desa dalam melaksanakan PSPM Raksa Desa .
 - b. Dalam penerapan PSPM Raksa Desa masih terjadi ketertinggalan sosialisasi dasar hukum
 - c. Adanya masalah saat akan menentukan pihak penerima bantuan. Hal itu disebabkan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat.
 - d. Total bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan program yang dijalankan.
 - e. Terdapat dua tahap dalam mencairkan dana
2. Faktor Pendukung
 - a. Hingga sekarang pembiayaan program ini masih berlanjut dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bandung. Hal itu karena Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
 - b. Tingginya keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga, pikiran, uang serta bahan material juga turut mendukung pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
 - c. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terkoordinasi dengan baik antara tiap pihak terkait sehingga tidak terjadi salah komunikasi.

Dari faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tingkat ekonomi dan taraf hidup masyarakat, serta tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui realisasi program-program pembangunan yang sudah diterapkan oleh pemerintah maka pemerintah desa dan masyarakat harus bekerjasama agar berhasil dalam mewujudkan pembangunan. Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi faktor penghambat, diantaranya: (1) Meningkatkan kinerja aparat desa. (2) Melakukan pembinaan kepada para aparat desa mengenai PSPM Raksa Desa. (3) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. (4) Memfasilitasi penerima bantuan yang dinilai masih kurang.

E. SIMPULAN

Dalam pembangunan nasional di Indonesia, tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Peran penting pemerintah

dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan. Dari hasil pembahasan terkait program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat Raksa Desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Namun, perlu ditingkatkan lagi pengawasan pada setiap kegiatan program serta mengembangkan program-program terkait kesejahteraan masyarakat dengan inovasi yang lebih kreatif. Program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat Raksa Desa di desa Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung berhasil berkat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pengawasan program perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara pemerintah perlu menciptakan inovasi kreatif untuk program-program kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Abdurohim. (2018). Impelementasi Program “Sabilulungan” Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 13–30.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mushawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan San Manajemen Publik*, 3(2), 63–64.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Mtodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)* (1st ed., pp. 84–85). PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Ejournal.Uin-Suska Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Digdowiswsio, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.
- Gumilar, D. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 27–35.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24–29.
- Imtihan, H., Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Musrenbag Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Neo-Bis*, 11(1).
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Governance*, 5(1), 1–18.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 94–95.
- Ulumiyah, I., Andi Gani, A.J., Indah Mindarti, L. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi PUBlik*, 1(5), 890–899.